



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 2 Juli 2025

Nomor : T-0005.1.5/1697/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan Asistensi Pembinaan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Kepada Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit (terlampir)
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/146/AA.05/2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dipandang perlu untuk tahun mendatang dapat meningkatkan Nilai Predikat SAKIP.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan Asistensi Pembinaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 17 Juli 2025
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Hotel Orchardz Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menugaskan 2 (dua) orang Pejabat yang membidangi untuk hadir pada acara dimaksud, biaya transportasi dan akomodasi dibebankan ke Perangkat Daerah masing-masing, panitia menanggung konsumsi selama rapat hanya untuk 2 (dua) orang, konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Roa Sarimalia Hp/Wa. 082111306892.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).

DAFTAR UNDANGAN

A. TIM SAKIP PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Irban Wilayah IV)
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

B. PERANGKAT DAERAH

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
10. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
14. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
16. Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
17. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
21. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
23. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
24. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
25. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
26. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
27. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
28. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
29. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
30. Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
31. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
32. Rumah Sakit Siti Fatimah Azzahra Provinsi Sumatera Selatan

LAPORAN HASIL ASISTENSI PEMBINAAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 OLEH TIM KEMENPAN RB RI

- A. Dasar Pelaksanaan
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/146/AA.05/2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 2. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor T-0005.1.5/1697/VII/2025 Tanggal 02 Juli 2025 Tentang Undangan Asistensi Pembinaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. .
 3. Surat Perintah Tugas Nomor 094/522/7.1/RSUD-SF/VII/2025 perihal Undangan Asistensi Pembinaan Penyusunan Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
- Dilaksanakan di Hotel Orchardz Jakarta , Hari Kamis Tanggal 17 Juli 2025 Pukul 08.00 WIB s.d selesai.
- C. Tim yang Ditugaskan :
1. Kasubbag Perencanaan dan Anggaran dan Staf
- D. Hasil Asistensi Pembinaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 :
1. Laporan dan arahan Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel
 2. Penyampaian MAteri dan Pengarahan Asisten Deputi Perumusan kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan oleh Bapak Kamaruddin Ak., M.Sc
 - a. Laporan Kinerja
 - 1) Kebijakan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah
 - 2) Tujuan pelaporan kinerja :
 - a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
 - b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya
 - c) Sistematika Laporan Kinerja

Bab I	Pendahuluan disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategik organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II	Perencanaan Kinerja diuraikan ringkasan/khtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi B. Realisasi Anggaran diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV	Penutup diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu	

- b. Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Provinsi Sumatera Selatan





TUJUAN, RUANG LINGKUP & KOMPONEN EVALUASI

TUJUAN

Mengetahui sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil

RUANG LINGKUP

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja;
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikannya;
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

Kategori	Sub-kategori			
	Sub-kategori 1	Sub-kategori 2	Sub-kategori 3	Sub-kategori 4
Perencanaan Kinerja	1	2	3	4
Pengukuran Kinerja	5	6	7	8
Pelaporan Kinerja	9	10	11	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	13	14	15	16

- Penilaian mencakup 4 komponen yang masing-masing komponen terdiri dari 3 sub-komponen yang meliputi: keberadaan (20%), kualitas (30%) dan pemanfaatan (50%);
- Penilaian dilakukan pada masing-masing sub-komponen dengan kriteria tertentu;
- Penilaian mencakup akuntabilitas kinerja pada level instansi/pemda dan level unit/perangkat daerah yang dilakukan secara sampling.



KOMPONEN PENILAIAN

PERENCANAAN KINERJA - 30

Sub-komponen	
Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6
Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penjelasan (sampling) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	6
Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	6

PELAPORAN - 15

Sub-komponen	
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,5
Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategikebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5

PENGUKURAN - 30

Sub-komponen	
Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15

EVALUASI INTERNAL - 25

Sub-komponen	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,5
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,5



PREDIKAT SAKIP

KURANG (NILAI > 40 – 50)

Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat

CUKUP BAIK (NILAI > 50 – 60)

Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar, khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja

BAIK (NILAI > 60 – 70)

Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, serta pengukuran kinerja baru dilakukan sampai ke level eselon 2/unit kerja

SANGAT MEMUASKAN (NILAI > 90 – 100)

Telah terwujud good governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu

MEMUASKAN (NILAI > 80 – 90)

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke eselon 4/Pengawas/subkoordinator

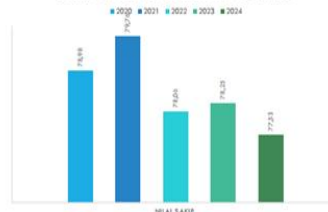
SANGAT BAIK (NILAI > 70 – 80)

Terdapat gambaran bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke eselon 18/koordinator



NILAI SAKIP PROVINSI SUMATERA SELATAN 5 TAHUN TERAKHIR

SAKIP PROVINSI SUMATERA SELATAN



Tahun	Nilai
2024	77,53
2023	78,25
2022	78,06
2021	79,76
2020	78,98



HASIL EVALUASI SAKIP PEMPROV SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,99	25,44
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,34	22,39
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,12	10,22
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,80	19,47
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,25	77,53
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB



CATATAN IMPLEMENTASI SAKIP 2024

PERENCANAAN KINERJA

- Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 belum seluruhnya dilakukan berdasarkan hasil mekanisme penjenjangan kinerja dan belum dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya
- Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi outcome atau bersifat kegiatan/output.
- Beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan, dan cukup.



CATATAN IMPLEMENTASI SAKIP 2023

PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan logis dalam mencapai kinerja.
- Penetapan program belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.
- Kinerja individu belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi.



CATATAN IMPLEMENTASI SAKIP 2023

PENGUKURAN KINERJA

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan unit kerjanya belum melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dari rencana aksi kinerja;
- Belum terdapat pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- Belum ada upaya dalam perbaikan pengukuran kinerja melalui sistem informasi kinerja;
- Tidak ada informasi memadai terkait koordinasi dalam mencapai kinerja pembangunan daerah antar PD.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada perangkat daerah masih berorientasi pada penyerapan anggaran.



CATATAN IMPLEMENTASI SAKIP 2023

PELAPORAN KINERJA

- Belum seluruh laporan kinerja tahun 2023 tingkat PD dipublikasikan secara umum melalui laman resmi pemerintah daerah;
- Sebagian laporan kinerja perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.



CATATAN IMPLEMENTASI SAKIP 2023

EVALUASI KINERJA INTERNAL

a. Laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;

b. Belum seluruh PD menindaklanjuti hasil evaluasi;

c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja;

d. Belum ada implementasi kebijakan *reward dan punishment* secara menyeluruh atas hasil evaluasi SAKIP internal.



REKOMENDASI SAKIP 2024

• Menindaklanjuti kembali rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti;

• Mengidentifikasi faktor-faktor penting (CSF) penyebab kemiskinan di Provinsi

• Mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tepat sesuai pohon kinerja;

• Melibatkan peran seluruh *stakeholders* untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar PD juga menjadi salah satu langkah pendukungnya;

• Memanfaatkan hasil *reviu* dan perbaikan dari penjenjangan/*cascading* kinerja sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;



REKOMENDASI SAKIP 2024

• Memastikan definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja telah digunakan menjadi pedoman dalam mengukur ketercapaian kinerja oleh seluruh Perangkat Daerah;

• Menegaskan kesesuaian antara target kinerja yang ditetapkan dengan indikator kinerja;

• Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah dan perangkat daerah;

• Memastikan seluruh Perangkat Daerah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP ;

3. Sosialisasi aplikasi e SAKIP oleh Kominfo

4. DESK

5. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan sebagai acuan selanjutnya, diucapkan terima kasih .

Yang ditugaskan,

1. Umu Ajizah, SE., M. Si

2. Nadhia Chairunisya, SE

DOKUMENTASI

ASISTENSI PEMBINAAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 OLEH KEMENPAN RB RI HOTEL ORCHARDZ JAKARTA , 16 – 18 JULI 2025

